



**BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 10 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang** :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu mengatur dan menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan Nitrogen, Phosphor dan Kalium pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts /OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871 /Kpts/OT.160/ 2/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV, yang jenisnya terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
11. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetankan oleh Menteri Pertanian

13. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
19. Penyalur di lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
20. Penyalur di lini IV adalah Pengecer resmi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
21. Kelompok Tani adalah Kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat RDKK adalah Rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun dari hasil musyawarah anggota kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang, yang merupakan alat pesanan Pupuk Bersubsidi kepada penyalur sarana produksi pertanian.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang selanjutnya disebut KP3 adalah Wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan / atau udang paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian dan diketahui oleh Kepala BP4K serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2016.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, kecamatan, jenis dan jumlah.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVII Peraturan Bupati ini.
- (5) Dinas Pertanian Kabupaten Buton bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi harus disesuaikan dengan alokasi masing-masing Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani berdasarkan RDKK;
 - c. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu dan harga.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi pada tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan
- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange

Pasal 8

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan Penyalur di Lini III dan IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk penyerahan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur dilini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana telah ditetapkan melalui Permentan Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 sebagai berikut :
- a Pupuk Urea = Rp. 1.800,- / kg
 - b Pupuk ZA = Rp. 1.400,- / kg
 - c SP – 36 = Rp. 2.000,- / kg
 - d Pupuk NPK = Rp. 2.300,- / kg
 - e Pupuk Organik = Rp. 500,- / kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak dipenyulur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a Pupuk Urea = 50 kg
 - b Pupuk ZA = 50 kg
 - c SP – 36 = 50 kg
 - d Pupuk NPK = 50 kg atau 20 Kg
 - e Pupuk Organik = 40 kg atau 20 Kg

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Buton wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di daerah.
- (2) Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Buton dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Buton wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Di tetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2016

BUPATI BUTON,


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAC HUKUM	
KADIS PERTAMIAN	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Di tetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 MARET 2016

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Di tetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 Maret 2016

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 18 MARET 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 102

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 Maret 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTEGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
MENURUT SUB SEKTOR

No	SubSektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	TON
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Tanaman Pangan	162.69	74.75	28.21	205.83	81.71	
2.	Hortikultura	9.68	5.99	1.41	12.49	8.84	
3.	Perkebunan	22.72	15.83	5.00	39.14	8.36	
4.	Peternakan	1.85	0.60	0.38	1.89	0.24	
5.	Perikanan Budidaya	3.06	1.62	-	0.69	0.9	
	<i>Jumlah</i>	200.00	99.8	35.0	260.0	100.0	



BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECEBAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

No	KECAMATAN	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	TON
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pasarwajo	14.00	14.91	2.46	18.20	7.01	
2	Wabula	4.30	7.23	0.84	6.24	2.40	
3	Wolowa	10.00	7.08	1.76	13.00	5.01	
4	Lasalimu Selatan	50.00	18.31	8.80	65.01	25.05	
5	Siotapina	16.00	10.12	2.82	20.80	8.02	
6	Lasalimu	46.00	14.30	8.10	59.81	23.05	
7	Kapontori	59.20	27.86	10.42	76.97	29.66	
	Jumlah	200.0	99.8	35	260	100	

PEJABAT PARAF
 SEKDA
 ASISTEN II
 KABAG HUKUM
 KADIS. PERTANIAN

BUPATI BUTON,
 SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 12 Maret 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECIERAN TERTINGGI (HEP) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

No	Jenis Pupuk	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Urea	2000.0	20.29	15.44	16.00	16.62	17.21	15.21	10.10	15.90	8.70	15.21	20.61	28.71
2	SP-36	99.8	13.71	8.31	10.21	10.71	9.31	7.61	4.30	7.91	3.70	7.41	8.11	8.51
3	ZA	35	4.20	2.70	3.20	2.90	2.80	2.90	1.70	3.30	1.60	3.00	3.30	3.60
4	NPK	260	28.62	20.88	25.63	25.66	24.08	20.82	13.06	21.19	12.76	20.79	23.55	23.01
5	Organik	100	8.30	6.60	10.80	10.40	9.30	7.90	4.80	8.30	4.40	9.60	10.30	9.50
	<i>Jumlah</i>	695	75.12	53.93	65.84	66.29	62.70	54.44	33.96	56.60	31.16	56.01	65.87	73.33

Ton

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS. PERTANIAN	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 Maret 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : Urea

Ton

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	162.69	16.52	12.55	13.03	13.50	13.98	12.41	8.20	12.92	7.09	12.38	16.74	23.37
2	Hortikultura	9.68	0.98	0.74	0.77	0.80	0.84	0.73	0.49	0.76	0.44	0.73	1.00	1.39
3	Perkebunan	22.72	2.30	1.77	1.81	1.89	1.95	1.73	1.14	1.80	0.99	1.73	2.33	3.26
4	Peternakan	1.9	0.18	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.09	0.14	0.08	0.14	0.19	0.27
5	Perikanan Budidaya	3.06	0.30	0.24	0.24	0.26	0.27	0.23	0.15	0.24	0.13	0.23	0.32	0.44
	<i>Jumlah</i>	200.0	20.3	15.46	16.0	16.6	17.2	15.2	10.1	15.9	8.7	16.2	20.6	28.7

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KANDS. PERTANIAN	

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 10 TAHUN 2016

TANGGAL 17 MARET 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Jenis Pupuk : SP-36

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	74.750	10,90	6,12	7,64	8,04	6,95	5,25	3,22	5,88	2,76	5,55	6,05	6,39
2	Hortikultura	5,99	0,87	0,50	0,61	0,65	0,55	0,43	0,26	0,47	0,22	0,44	0,48	0,51
3	Perkebunan	15,83	1,56	1,58	1,62	1,63	1,47	1,04	0,74	0,56	0,94	1,28	1,68	1,73
4	Peternakan	0,60	0,09	0,05	0,06	0,06	0,06	0,04	0,03	0,05	0,02	0,04	0,05	0,05
5	Perikanan Budidaya	1,62	0,24	0,13	0,17	0,17	0,16	0,11	0,07	0,13	0,06	0,12	0,13	0,13
	<i>Jumlah</i>	99,8	13,66	8,38	10,10	10,55	9,19	6,87	4,32	7,09	4,00	7,43	8,39	8,81

Ton

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

Jenis Pupuk : ZA

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
											12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	28.21	3.37	2.20	2.59	2.33	2.24	2.30	1.34	2.65	1.36	2.40	2.64	2.89
2	Hortikultura	1.41	0.17	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.07	0.13	0.07	0.12	0.13	0.15
3	Perkebunan	5.00	0.60	0.39	0.46	0.42	0.39	0.41	0.24	0.47	0.23	0.42	0.47	0.50
4	Peternakan	0.38	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	35.0	4.18	2.74	3.21	2.90	2.77	2.86	1.68	3.28	1.59	2.97	3.27	3.58

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KAPIS. PERTANIAN	

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGAPAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

Jenis Pupuk : NPK

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	205.83	22.65	16.54	20.29	20.32	19.05	16.48	10.31	16.79	10.10	16.46	18.65	18.19
2	Hortikultura	12.49	1.37	1.00	1.20	1.28	1.16	1.00	0.64	1.01	0.62	1.00	1.13	1.11
3	Perkebunan	39.14	4.30	3.14	3.86	3.86	3.62	3.14	1.96	3.19	1.91	3.13	3.55	3.47
4	Peternakan	1.89	0.22	0.15	0.18	0.18	0.18	0.15	0.12	0.15	0.10	0.15	0.15	0.17
5	Perikanan Budidaya	0.69	0.08	0.05	0.07	0.07	0.07	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0.07	0.07
	Jumlah	260.0	28.6	20.9	25.6	25.7	24.1	20.8	13.1	21.2	12.8	20.8	23.55	23.0

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS PERTANIAN	

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERKINJAL (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

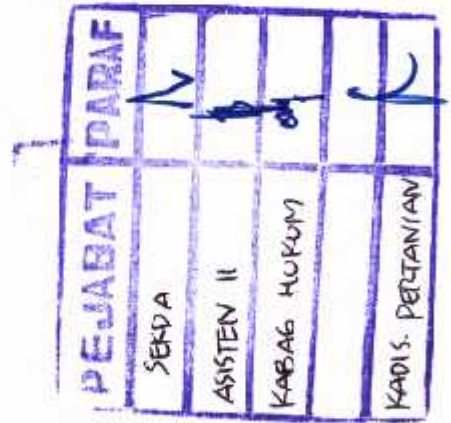
Jenis Pupuk : Orgsnik

No	Sub Sektor	Setahun	Ton											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	81.71	6.75	5.37	8.80	8.46	7.58	6.47	3.89	6.79	3.63	7.81	8.45	7.71
2	Hortikultura	8.84	0.74	0.58	0.95	0.92	0.81	0.70	0.42	0.74	0.39	0.84	0.91	0.85
3	Perkebunan	8.36	0.70	0.55	0.91	0.87	0.78	0.66	0.39	0.70	0.37	0.80	0.85	0.79
4	Peternakan	0.24	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03
5	Perikanan Budidaya	0.86	0.07	0.05	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.07	0.04	0.08	0.09	0.08
	Jumlah	100	8.27	6.56	10.78	10.36	9.28	7.91	4.76	8.31	4.44	9.56	10.33	9.46

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Pasarwato	1.420	1.081	1.120	1.163	1.204	1.065	0.707	1.113	0.609	1.065	1.443	2.010	14.00
2	Wabula	0.487	0.371	0.384	0.399	0.413	0.365	0.242	0.382	0.209	0.365	0.495	0.689	4.80
3	Wolowa	1.014	0.772	0.800	0.831	0.860	0.761	0.505	0.795	0.435	0.761	1.031	1.436	10.00
4	Lasalimu Solatan	5.072	3.860	4.000	4.155	4.302	3.803	2.525	3.975	2.175	3.803	5.153	7.178	50.00
5	Siotepina	1.623	1.235	1.280	1.330	1.377	1.217	0.808	1.272	0.696	1.217	1.649	2.297	16.00
6	Lasalimu	4.666	3.551	3.680	3.823	3.957	3.498	2.323	3.657	2.001	3.498	4.740	6.603	46.00
7	Kapontori	6.005	4.570	4.736	4.920	5.093	4.502	2.990	4.706	2.575	4.502	6.101	8.498	59.20
	Jumlah	20.29	15.44	16.00	16.62	17.21	15.21	10.10	15.90	8.70	15.21	20.61	28.71	200.0

BUPATI BUTON

PEJABAT PARAF
 SEKDA
 ASISTEN II
 KABANG HUKUM
 KADIS. PERTANIAN

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BUTON

NCMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTEKINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Pasarwajo	0.991	0.753	0.782	0.810	0.839	0.745	0.492	0.775	0.425	0.743	1.004	1.402	3.761
2	Wabula	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Wolowa	1.322	1.004	1.042	1.080	1.118	0.993	0.656	1.034	0.567	0.990	1.339	1.870	13.015
4	Lasalimu Selatan	8.260	6.275	6.515	6.750	6.990	6.205	4.100	6.460	3.545	6.190	8.370	11.685	81.345
5	Siotapina	1.652	1.255	1.303	1.350	1.398	1.241	0.820	1.292	0.709	1.238	1.674	2.337	16.269
6	Lasalimu	1.652	1.255	1.303	1.350	1.398	1.241	0.820	1.292	0.709	1.238	1.674	2.337	16.27
7	Kapontori	2.643	2.008	2.085	2.160	2.237	1.986	1.312	2.067	1.134	1.981	2.678	3.739	26.03
	Jumlah	16.52	12.55	13.03	13.50	13.98	12.41	8.20	12.92	7.09	12.38	16.74	23.37	162.69

BUPATI BUTON,



SAMUSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EKERAN TERTEKUNGHI HIET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN

KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : Hortikultura

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pasarwajo	0.063	0.048	0.050	0.051	0.054	0.047	0.032	0.049	0.028	0.047	0.064	0.089	0.62
2	Wabula	0.069	0.052	0.054	0.056	0.059	0.051	0.034	0.053	0.031	0.051	0.070	0.097	0.68
3	Wolowa	0.049	0.037	0.039	0.040	0.042	0.037	0.025	0.038	0.022	0.037	0.050	0.070	0.48
4	Lesalimu Selatan	0.103	0.078	0.081	0.084	0.088	0.077	0.052	0.080	0.046	0.077	0.105	0.146	1.02
5	Siotapina	0.078	0.059	0.062	0.064	0.067	0.058	0.039	0.061	0.035	0.058	0.080	0.111	0.77
6	Lasalimu	0.128	0.097	0.097	0.104	0.110	0.095	0.064	0.099	0.057	0.095	0.131	0.181	1.26
7	Kapontori	0.491	0.371	0.386	0.401	0.421	0.366	0.245	0.381	0.220	0.366	0.501	0.696	4.84
	Jumlah	0.98	0.74	0.77	0.80	0.84	0.73	0.49	0.76	0.44	0.73	1.00	1.39	9.68

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : Perkebunan

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Marset	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pasarwajo	0.506	0.390	0.399	0.416	0.429	0.381	0.251	0.396	0.218	0.381	0.513	0.718	5.00
2	Wabula	0.253	0.195	0.199	0.208	0.215	0.190	0.125	0.198	0.109	0.190	0.256	0.359	2.50
3	Wolowa	0.276	0.212	0.217	0.227	0.234	0.208	0.137	0.216	0.119	0.208	0.280	0.391	2.72
4	Lasalimu Selatan	0.414	0.319	0.326	0.340	0.351	0.311	0.205	0.324	0.178	0.311	0.419	0.587	4.09
5	Sictapina	0.207	0.159	0.163	0.170	0.176	0.156	0.103	0.162	0.089	0.156	0.210	0.293	2.04
6	Lasallimu	0.254	0.196	0.200	0.209	0.215	0.191	0.126	0.199	0.109	0.191	0.257	0.360	2.51
7	Kapontori	0.391	0.301	0.308	0.321	0.332	0.294	0.194	0.306	0.168	0.294	0.396	0.554	3.86
	Jumlah	2.80	1.77	1.81	1.89	1.95	1.73	1.14	1.80	0.99	1.73	2.33	3.26	22.72

BUPATI BUTON,

PEJABAT PARAF	
SEKDA	
ASISTEN D	
KABAG HUKUM	
KADIS. PERTANIAN	

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTEGSI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : *Peternakan*

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Pasarwajo	0.028	0.022	0.022	0.024	0.025	0.022	0.014	0.022	0.013	0.022	0.030	0.042	0.29
2	Wabula	0.016	0.013	0.013	0.014	0.014	0.013	0.008	0.013	0.007	0.013	0.017	0.024	0.16
3	Wolowa	0.016	0.013	0.013	0.014	0.014	0.013	0.008	0.013	0.007	0.013	0.017	0.024	0.16
4	Laselimu Selatan	0.025	0.020	0.020	0.021	0.022	0.020	0.013	0.020	0.011	0.020	0.027	0.038	0.25
5	Siotapina	0.022	0.017	0.017	0.018	0.020	0.017	0.011	0.017	0.010	0.017	0.023	0.033	0.22
6	Laselimu	0.025	0.018	0.018	0.020	0.021	0.018	0.012	0.018	0.011	0.018	0.025	0.036	0.24
7	Kapontori	0.051	0.040	0.040	0.043	0.046	0.040	0.026	0.040	0.023	0.040	0.054	0.077	0.52
	Jumlah	0.18	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.09	0.14	0.08	0.14	0.19	0.27	1.9

BUPATI BUTON,

DEJABAT	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KABAG. PERTANIAN	<i>[Signature]</i>

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : *Budidaya Perikanan*

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari 3	Februari 4	Maret 5	April 6	Mei 7	Juni 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14	
1	Pasarwajo	0.020	0.015	0.015	0.017	0.017	0.015	0.010	0.015	0.008	0.015	0.021	0.028	0.20
2	Wabula	0.022	0.016	0.017	0.018	0.019	0.016	0.011	0.017	0.009	0.016	0.022	0.031	0.21
3	Wolowa	0.016	0.012	0.012	0.013	0.014	0.012	0.008	0.012	0.007	0.012	0.016	0.022	0.15
4	Lasalimu Selatan	0.034	0.025	0.023	0.029	0.030	0.025	0.017	0.026	0.014	0.025	0.035	0.048	0.34
5	Sitotapina	0.025	0.018	0.019	0.021	0.022	0.018	0.012	0.019	0.010	0.018	0.026	0.035	0.24
6	Lasalimu	0.030	0.040	0.031	0.034	0.035	0.030	0.020	0.031	0.017	0.030	0.042	0.057	0.40
7	Kapcentori	0.155	0.115	0.120	0.130	0.135	0.115	0.075	0.120	0.065	0.115	0.160	0.220	1.53
	Jumlah	0.30	0.24	0.24	0.26	0.27	0.28	0.16	0.24	0.13	0.23	0.32	0.442	3.06

BUPATI BUTON,

PEJABAT	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
KADAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KADIS. PERTANIAN	<i>[Signature]</i>

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERKINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SP-36 SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Pasarwajo	2.048	1.241	1.525	1.600	1.390	1.136	0.643	1.181	0.558	1.106	1.211	1.271	14.91
2	Wabula	0.993	0.602	0.740	0.775	0.674	0.551	0.312	0.573	0.268	0.537	0.587	0.616	7.23
3	Wolowa	0.973	0.589	0.724	0.760	0.660	0.540	0.305	0.561	0.263	0.525	0.575	0.604	7.08
4	Lasalimu Selatan	2.517	1.525	1.874	1.908	1.708	1.396	0.790	1.451	0.680	1.359	1.488	1.561	18.31
5	Siotapina	1.391	0.842	1.035	1.086	0.944	0.771	0.436	0.802	0.376	0.751	0.822	0.863	10.12
6	Lasalimu	1.965	1.190	1.463	1.534	1.334	1.090	0.617	1.133	0.531	1.061	1.162	1.219	14.30
7	Kapontori	3.828	2.319	2.850	2.990	2.538	2.123	1.201	2.207	1.034	2.068	2.263	2.375	27.86
	Jumlah	13.7	8.3	10.2	10.7	9.3	7.6	4.3	7.9	3.7	7.4	8.1	8.5	99.8

BUPATI BUTON



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN



LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN/TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SP-36 SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : Tanaman Pangan

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari 3	Februari 4	Maret 5	April 6	Mei 7	Juni 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14	
1	Pasarwajo	0.441	0.245	0.309	0.326	0.281	0.213	0.130	0.238	0.112	0.225	0.245	0.259	3.03
2	Wabula	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
3	Wolowa	0.216	0.121	0.151	0.159	0.138	0.104	0.064	0.116	0.055	0.110	0.120	0.127	1.48
4	Lasalimu Selatan	4.170	2.342	2.923	3.076	2.659	2.009	1.232	2.250	1.056	2.123	2.315	2.445	28.60
5	Siotapina	0.988	0.554	0.692	0.728	0.630	0.476	0.292	0.533	0.250	0.503	0.548	0.579	6.77
6	Lasalimu	2.188	1.228	1.533	1.614	1.395	1.054	0.646	1.180	0.554	1.114	1.214	1.282	15.00
7	Keponitori	2.897	1.627	2.031	2.137	1.847	1.395	0.856	1.563	0.734	1.475	1.608	1.698	19.87
	Jumlah	10.90	6.12	7.64	8.04	6.95	5.25	3.22	5.88	2.76	5.55	8.05	6.39	74.75

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT PARAF	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADK. PERTANIAN	

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SP-36 SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016





Sub Sektor : Hortikultura

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Pesarwaju	0.113	0.065	0.080	0.085	0.072	0.056	0.034	0.061	0.029	0.057	0.063	0.067	0.781
2	Wabula	0.044	0.025	0.031	0.053	0.028	0.022	0.013	0.024	0.011	0.022	0.024	0.026	0.300
3	Wolowa	0.061	0.035	0.043	0.046	0.039	0.030	0.018	0.033	0.015	0.031	0.034	0.036	0.419
4	Lasalimu Selatan	0.092	0.053	0.064	0.068	0.058	0.045	0.027	0.049	0.023	0.046	0.051	0.054	0.631
5	Sictapina	0.107	0.061	0.075	0.080	0.067	0.053	0.032	0.058	0.027	0.054	0.059	0.062	0.734
6	Lasalimu	0.109	0.063	0.076	0.081	0.069	0.054	0.033	0.059	0.028	0.055	0.060	0.064	0.749
7	Kapontori	0.345	0.198	0.242	0.258	0.218	0.171	0.103	0.186	0.087	0.175	0.190	0.202	2.377
	Jumlah	0.87	0.50	0.61	0.65	0.55	0.43	0.28	0.47	0.22	0.44	0.48	0.51	5.89

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT PARAF	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS. PERTANIAN	

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016





TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SP-36 SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : Perkebunan

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari 3	Februari 4	Marat 5	April 6	Mei 7	Juni 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14	
1	Pasarwajo	0.343	0.348	0.356	0.359	0.323	0.229	0.163	0.123	0.207	0.282	0.370	0.381	3.483
2	Wabula	0.172	0.175	0.179	0.180	0.162	0.115	0.082	0.062	0.104	0.141	0.186	0.191	1.749
3	Wolowa	0.142	0.144	0.147	0.148	0.134	0.096	0.067	0.051	0.086	0.116	0.153	0.157	1.441
4	Lasalimu Selatan	0.289	0.293	0.300	0.302	0.272	0.193	0.137	0.104	0.174	0.237	0.311	0.320	2.932
5	Siotapina	0.191	0.194	0.198	0.200	0.180	0.127	0.091	0.069	0.115	0.157	0.206	0.212	1.939
6	Lasalimu	0.275	0.278	0.285	0.287	0.259	0.183	0.130	0.099	0.165	0.225	0.296	0.304	2.786
7	Kapontori	0.148	0.150	0.154	0.155	0.139	0.099	0.070	0.053	0.089	0.121	0.159	0.164	1.501
	Jumlah	1.56	1.58	1.62	1.63	1.47	1.04	0.74	0.56	0.94	1.28	1.68	1.73	15.83

BUPATI BUTON.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASSTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS. PERTANIAN	

SAMSU UMAR ABDUL SAMTUN

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SP-36 SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : *Peternakan*

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	Pasarwajo	0.014	0.008	0.009	0.009	0.009	0.006	0.005	0.008	0.003	0.006	0.008	0.008	0.008	0.094
2	Wabula	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.048
3	Wocowa	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.047
4	Lasalimu Selatan	0.012	0.007	0.008	0.008	0.008	0.005	0.004	0.007	0.003	0.005	0.007	0.007	0.007	0.081
5	Siotapina	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.002	0.004	0.005	0.005	0.005	0.054
6	Lasalimu	0.012	0.007	0.008	0.008	0.008	0.005	0.004	0.007	0.003	0.005	0.007	0.007	0.007	0.079
7	Kapontori	0.030	0.017	0.020	0.020	0.020	0.013	0.010	0.017	0.007	0.013	0.017	0.017	0.017	0.202
	Jumlah	0.09	0.05	0.06	0.06	0.06	0.04	0.03	0.05	0.02	0.04	0.05	0.05	0.05	0.60

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMTUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS. PERTANIAN	

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDILUNTUKSEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SP-36 SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : *Budidaya Perikanan*

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah	
		Januari 3	Februari 4	Maret 5	April 6	Mai 7	Juni 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14		
1	Paearwajo	0.048	0.026	0.034	0.034	0.032	0.022	0.014	0.023	0.012	0.024	0.026	0.026	0.026	0.324
2	Wabala	0.029	0.016	0.020	0.020	0.019	0.013	0.008	0.016	0.007	0.014	0.016	0.016	0.016	0.194
3	Wolowa	0.024	0.013	0.017	0.017	0.016	0.011	0.007	0.013	0.006	0.012	0.013	0.013	0.013	0.162
4	Lasalimu Selatan	0.026	0.014	0.019	0.019	0.018	0.012	0.008	0.014	0.007	0.013	0.014	0.014	0.014	0.178
5	Siotapina	0.019	0.010	0.014	0.014	0.013	0.009	0.006	0.010	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	0.130
6	Lasalimu	0.022	0.012	0.015	0.015	0.014	0.010	0.006	0.012	0.005	0.011	0.012	0.012	0.012	0.146
7	Kapontori	0.072	0.039	0.051	0.051	0.048	0.033	0.021	0.039	0.018	0.035	0.039	0.039	0.039	0.486
	Jumlah	0.24	0.13	0.17	0.17	0.16	0.11	0.07	0.13	0.06	0.12	0.13	0.13	0.13	1.6

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS PERTANIAN	

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECEPAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ZA SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari 3	Februari 4	Maret 5	April 6	Mei 7	Juni 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14	
1	Pasarwajo	0.294	0.189	0.224	0.203	0.196	0.203	0.119	0.231	0.112	0.210	0.231	0.252	2.46
2	Wabula	0.101	0.055	0.077	0.070	0.067	0.070	0.041	0.079	0.038	0.072	0.079	0.086	0.84
3	Wolowa	0.210	0.135	0.160	0.145	0.140	0.145	0.085	0.185	0.080	0.150	0.165	0.180	1.76
4	Lasalimu Selatan	1.050	0.675	0.800	0.725	0.700	0.725	0.425	0.825	0.400	0.750	0.825	0.900	8.80
5	Siotapina	0.336	0.216	0.256	0.232	0.224	0.232	0.136	0.264	0.128	0.240	0.264	0.288	2.82
6	Lasalimu	0.966	0.621	0.736	0.667	0.644	0.667	0.391	0.759	0.368	0.690	0.759	0.828	8.10
7	Kapontori	1.243	0.799	0.947	0.858	0.829	0.858	0.503	0.977	0.474	0.888	0.977	1.066	10.42
	Jumlah	4.20	2.70	3.20	2.90	2.80	2.90	1.70	3.30	1.80	3.00	3.30	3.60	35

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEK-DA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS- PERTANIAN	

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ZA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : *Tanam Pangan*

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pasarwajo	0.202	0.132	0.155	0.140	0.134	0.138	0.080	0.159	0.075	0.144	0.158	0.173	1.693
2	Wabua	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Wolowa	0.270	0.176	0.207	0.186	0.179	0.184	0.107	0.212	0.101	0.192	0.211	0.231	2.257
4	Lasalimu Selatan	1.685	1.100	1.295	1.165	1.120	1.150	0.570	1.325	0.630	1.200	1.320	1.445	14.105
5	Sitapina	0.337	0.220	0.259	0.233	0.224	0.230	0.134	0.265	0.126	0.240	0.264	0.289	2.821
6	Lasalimu	0.337	0.220	0.259	0.233	0.224	0.230	0.134	0.265	0.126	0.240	0.264	0.289	2.821
7	Kapontori	0.539	0.352	0.414	0.373	0.358	0.368	0.214	0.424	0.202	0.384	0.422	0.462	4.51
	Jumlah	3.37	2.20	2.59	2.33	2.24	2.30	1.84	2.65	1.26	2.40	2.64	2.89	28.21

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT PARAF	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS. PERTANIAN	

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSIHSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ZA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : Hortikultura

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Paserwajo	0.010	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.004	0.008	0.004	0.007	0.008	0.008	0.009	0.09
2	Wabula	0.012	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.005	0.009	0.005	0.008	0.009	0.011	0.10	
3	Wolowa	0.009	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.007	0.004	0.006	0.007	0.008	0.07	
4	Lasalimu Selatan	0.017	0.011	0.013	0.012	0.011	0.012	0.007	0.013	0.007	0.012	0.013	0.015	0.14	
5	Siotepina	0.014	0.009	0.010	0.010	0.009	0.010	0.006	0.010	0.006	0.010	0.010	0.012	0.11	
6	Lasalimu	0.022	0.014	0.017	0.016	0.014	0.016	0.009	0.017	0.009	0.016	0.017	0.020	0.19	
7	Kapontori	0.085	0.055	0.065	0.060	0.055	0.060	0.035	0.065	0.035	0.030	0.065	0.075	0.71	
	Jumlah	0.17	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.07	0.13	0.07	0.12	0.13	0.15	1.41	

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS. PERTANIAN	

LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ZA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : Perkebunan

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari 3	Februari 4	Maret 5	April 6	Mei 7	Juni 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14	
1	Pasarwajo	0.132	0.086	0.101	0.092	0.086	0.090	0.053	0.103	0.051	0.092	0.103	0.110	1.10
2	Wabula	0.066	0.043	0.051	0.046	0.043	0.045	0.026	0.052	0.025	0.046	0.052	0.055	0.55
3	Wolowa	0.072	0.047	0.055	0.050	0.047	0.049	0.029	0.056	0.028	0.050	0.056	0.060	0.60
4	Lasalimu Selatan	0.108	0.070	0.083	0.076	0.070	0.074	0.043	0.085	0.041	0.076	0.085	0.090	0.90
5	Siotapina	0.054	0.035	0.041	0.038	0.035	0.037	0.022	0.042	0.021	0.038	0.042	0.045	0.45
6	Lasalimu	0.066	0.043	0.051	0.046	0.043	0.045	0.027	0.052	0.025	0.046	0.052	0.055	0.55
7	Karontori	0.102	0.066	0.078	0.071	0.066	0.070	0.041	0.080	0.039	0.071	0.080	0.085	0.85
	Jumlah	0.60	0.39	0.48	0.42	0.39	0.41	0.24	0.47	0.23	0.42	0.47	0.50	5.00

BUPATI BUTON,

PEJABAT PARAF

SEKDA	
ASSTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS PERTANIAN	

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECEPAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ZA SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	Pasarwajo	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.06
2	Wabula	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.03
3	Wolowa	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.04
4	Lasalimu Selatan	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.05
5	Siotapina	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.05
6	Lasalimu	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.05
7	Kapontori	0.011	0.011	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.011	0.11
	Jumlah	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.38

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT PARAF
SEKOA
ASISTEN II
KABAG HUKUM
KAUSS. PERTANIAN

LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ZA SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Pasarwajo	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pasarwajo	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	Wabula	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Wolowa	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Lasalimu Selatan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	Siotapina	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	Lasalimu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	Kapontor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PABAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS. PERTANIAN	

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI NPK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari 3	Februari 4	Marot 5	April 6	Mei 7	Juni 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14	
1	Pasarwajo	2.003	1.462	1.794	1.796	1.686	1.457	0.914	1.483	0.893	1.455	1.549	1.611	18.20
2	Wabula	0.687	0.501	0.615	0.616	0.578	0.500	0.313	0.509	0.306	0.499	0.565	0.552	6.24
3	Wolowa	1.431	1.044	1.282	1.283	1.204	1.041	0.653	1.069	0.638	1.040	1.178	1.151	13.00
4	Lasalimu Selatan	7.155	5.220	6.408	6.415	6.020	5.205	3.265	5.298	3.190	5.198	5.888	5.753	65.01
5	Siotapina	2.290	1.670	2.050	2.053	1.926	1.666	1.045	1.695	1.021	1.663	1.884	1.841	20.80
6	Lasalimu	6.583	4.802	5.895	5.902	5.538	4.789	3.004	4.874	2.935	4.782	5.417	5.292	59.81
7	Kapontori	8.472	6.180	7.586	7.595	7.128	6.163	3.866	6.272	3.777	6.154	6.971	6.811	76.97
	Jumlah	28.62	20.9	25.6	25.7	24.1	20.8	13.1	21.2	12.8	20.8	23.55	23.0	260

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

KEJABAT PARAF	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS. PERTANIAN	

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERKINGLIHET) PUPUK BERSUBSIDI LINTUK SEKTOR PERTANIAN TAIUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI NPK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAIUN 2016

Sub Sektor : Tanaman Pangan

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari 3	Februari 4	Maret 5	April 6	Mei 7	Jun 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14	
1	Pasarwajo	1.359	0.992	1.217	1.219	1.143	0.989	0.619	1.007	0.606	0.988	1.119	1.091	12.350
2	Wabula	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Wulowa	1.812	1.323	1.623	1.626	1.524	1.318	0.826	1.343	0.808	1.317	1.492	1.455	16.466
4	Lasalimu Selatan	11.325	8.270	10.145	10.160	9.525	8.240	5.155	8.395	5.050	8.230	9.325	9.095	102.915
5	Siotapina	2.265	1.654	2.029	2.032	1.905	1.648	1.031	1.679	1.010	1.646	1.865	1.819	20.583
6	Lasalimu	2.265	1.654	2.029	2.032	1.905	1.648	1.031	1.679	1.010	1.646	1.865	1.819	20.58
7	Kapontori	3.624	2.646	3.246	3.251	3.048	2.637	1.650	2.686	1.616	2.634	2.984	2.910	32.93
	Jumlah	22.65	16.54	20.29	20.32	19.05	16.48	10.31	16.79	10.10	16.46	18.65	18.19	205.83

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS - PERTANIAN	

LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECEBRAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI NPK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah	
		TON													
		Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Pasarwajo	0.088	0.065	0.079	0.079	0.075	0.065	0.041	0.065	0.040	0.065	0.073	0.072	0.81	
2	Wabula	0.096	0.070	0.086	0.086	0.081	0.070	0.045	0.071	0.043	0.070	0.079	0.078	0.88	
3	Wobwa	0.069	0.050	0.062	0.062	0.058	0.050	0.032	0.051	0.031	0.050	0.057	0.056	0.63	
4	Lasalimu Selatan	0.144	0.105	0.130	0.130	0.122	0.105	0.067	0.106	0.065	0.105	0.119	0.117	1.32	
5	Siotapina	0.110	0.080	0.098	0.098	0.093	0.080	0.051	0.081	0.050	0.080	0.090	0.089	1.00	
6	Lasalimu	0.179	0.131	0.131	0.161	0.151	0.131	0.084	0.132	0.081	0.131	0.147	0.145	1.60	
7	Kapontori	0.686	0.501	0.616	0.616	0.581	0.501	0.321	0.506	0.311	0.501	0.566	0.556	8.26	
	Jumlah	1.37	1.00	1.20	1.23	1.16	1.00	0.64	1.01	0.62	1.00	1.13	1.11	12.49	

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI NPK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		TON												
		Januari 3	Februari 4	Maret 5	April 6	Mei 7	Juni 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14	
1	Pasarwajo	0.946	0.691	0.549	0.849	0.796	0.691	0.431	0.702	0.420	0.689	0.781	0.763	8.61
2	Wabula	0.473	0.345	0.425	0.425	0.398	0.345	0.216	0.351	0.210	0.344	0.391	0.382	4.30
3	Wclowa	0.516	0.377	0.463	0.463	0.434	0.377	0.235	0.383	0.229	0.376	0.426	0.416	4.70
4	Lasalimu Selatan	0.774	0.565	0.395	0.695	0.652	0.565	0.353	0.574	0.344	0.563	0.639	0.625	7.04
5	Siotapina	0.387	0.283	0.347	0.347	0.326	0.283	0.176	0.287	0.172	0.282	0.320	0.312	3.52
6	Lasalimu	0.474	0.346	0.426	0.426	0.399	0.346	0.216	0.352	0.211	0.345	0.392	0.383	4.32
7	Kapontori	0.731	0.534	0.556	0.656	0.615	0.534	0.333	0.542	0.325	0.532	0.604	0.590	6.65
	Jumlah	4.30	3.14	3.86	3.86	3.62	3.14	1.96	3.19	1.91	3.13	3.55	3.47	39.14

BUPATI BUTON,

PEJABAT PARAF
 SEKDA
 ASISTEN II
 KABAG HUKUM
 KADIS-PERTANIAN

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI NPK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15			
1	Pasarwajo	0.031	0.021	0.025	0.025	0.025	0.021	0.017	0.021	0.014	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.024	0.27
2	Wabula	0.020	0.014	0.016	0.016	0.016	0.014	0.011	0.014	0.009	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.17
3	Wolowa	0.020	0.014	0.016	0.016	0.016	0.014	0.011	0.014	0.009	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.17
4	Lasalimu Selatan	0.031	0.021	0.025	0.025	0.025	0.021	0.017	0.021	0.014	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.024	0.27
5	Sioropina	0.027	0.018	0.022	0.022	0.022	0.018	0.015	0.018	0.012	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.021	0.23
6	Lasalimu	0.030	0.020	0.024	0.024	0.024	0.020	0.016	0.020	0.013	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.022	0.25
7	Kapontori	0.062	0.042	0.050	0.050	0.050	0.042	0.034	0.042	0.028	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.048	0.53
	Jumlah	0.22	0.15	0.18	0.18	0.18	0.15	0.12	0.15	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	1.89

BUPATI BUTON,

PEJABAT PARAF
 SEKDA
 ASISTEN II
 KABAG HUKUM
 KAPIS. PERTANIAN

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI LINTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI NPK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Marct	April	Mei	Junj	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pasarwajo	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.005	0.04
2	Wabula	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.005	0.005	0.05
3	Wolowa	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.03
4	Lasalimu Selatan	0.009	0.006	0.008	0.008	0.008	0.006	0.003	0.006	0.003	0.006	0.008	0.008	0.08
5	Sotapina	0.006	0.004	0.006	0.006	0.006	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.006	0.006	0.06
6	Lasalimu	0.007	0.010	0.009	0.009	0.009	0.007	0.004	0.007	0.004	0.007	0.009	0.009	0.09
7	Kapontori	0.040	0.025	0.035	0.035	0.035	0.025	0.015	0.025	0.015	0.025	0.035	0.035	0.35
	Jumlah	0.08	0.05	0.07	0.07	0.07	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0.07	0.07	0.7

BUPATI BUTON,

MEJABAT PARAF
 SEKDA
 ASISTEN II
 KABAG HOKUM
 KADIS PERTANIAN

SAMSU UMAR ABDUL SAMJUN

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari 1	Februari 2	Maret 3	April 4	Mei 5	Juni 6	Juli 7	Agustus 8	September 9	Oktober 10	November 11	Desember 12	
1	Pasarwajo	0.581	0.462	0.756	0.728	0.651	0.553	0.336	0.581	0.308	0.672	0.721	0.665	7.01
2	Wabula	0.199	0.158	0.259	0.250	0.223	0.115	0.199	0.199	0.106	0.230	0.247	0.228	2.40
3	Wolowa	0.415	0.330	0.540	0.520	0.465	0.395	0.240	0.415	0.220	0.480	0.515	0.475	5.01
4	Lasalimu Selatan	2.075	1.650	2.700	2.600	2.325	1.975	1.200	2.075	1.100	2.400	2.575	2.375	25.05
5	Siotapina	0.664	0.528	0.864	0.832	0.744	0.384	0.664	0.664	0.352	0.768	0.824	0.760	8.02
6	Lasalimu	1.909	1.518	2.484	2.392	2.139	1.817	1.104	1.909	1.012	2.208	2.369	2.185	23.05
7	Kapontori	2.457	1.954	3.197	3.078	2.753	1.421	2.457	2.457	1.302	2.842	3.049	2.812	29.66
	Jumlah	8.30	6.60	10.80	10.40	9.30	7.90	4.80	8.30	4.40	9.60	10.30	9.50	100

BUPATI BUTON,

KEJABAT PARAF
 SEKDA
 ASISTEN II
 KABAG HUKUM
 KAPIS. PERTANIAN

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : Tanaman Pangan

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari 3	Februari 4	Maret 5	April 6	Mei 7	Juni 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14	
1	Pasarwajo	0.810	0.644	1.056	1.014	0.910	0.776	0.467	0.815	0.436	0.937	1.014	0.925	9.804
2	Wabula	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Wolowa	0.540	0.430	0.704	0.676	0.606	0.518	0.311	0.543	0.290	0.625	0.676	0.617	6.536
4	Lasalimu Selatan	1.688	1.343	2.200	2.113	1.895	1.618	0.973	1.698	0.908	1.953	2.113	1.928	20.425
5	Sictapina	0.676	0.538	0.881	0.846	0.759	0.648	0.389	0.880	0.363	0.782	0.846	0.772	8.178
6	Lasalimu	1.350	1.074	1.760	1.690	1.516	1.294	0.778	1.358	0.728	1.562	1.690	1.542	16.34
7	Kapontori	1.688	1.343	2.200	2.113	1.895	1.618	0.973	1.698	0.908	1.953	2.113	1.928	20.43
	Jumlah	6.75	5.37	8.80	8.45	7.58	6.47	3.89	6.79	3.63	7.81	8.45	7.71	81.71

BUPATI BUTON,

PEJABAT PARAF
 SEKDA
 ASISTEN II
 KABAG HUKUM
 KANIS - PERTANIAN

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016**

Sub Sektor : Hortikultura

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari 3	Februari 4	Maret 5	April 6	Mei 7	Juni 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14	
1	Pasarwajo	0.059	0.046	0.076	0.074	0.065	0.056	0.034	0.059	0.031	0.067	0.073	0.068	0.71
2	Wabula	0.081	0.064	0.105	0.101	0.089	0.077	0.046	0.081	0.043	0.092	0.100	0.094	0.97
3	Wolowa	0.052	0.041	0.067	0.064	0.057	0.049	0.029	0.052	0.027	0.059	0.064	0.060	0.62
4	Lasalimu Selatan	0.148	0.116	0.190	0.184	0.162	0.140	0.084	0.148	0.078	0.168	0.182	0.170	1.77
5	Siotapina	0.074	0.058	0.095	0.092	0.081	0.070	0.042	0.074	0.039	0.084	0.091	0.085	0.89
6	Lasalimu	0.104	0.081	0.133	0.129	0.113	0.098	0.059	0.104	0.055	0.118	0.127	0.119	1.24
7	Kepontori	0.221	0.173	0.284	0.275	0.242	0.209	0.126	0.221	0.117	0.251	0.272	0.254	2.65
	Jumlah	0.74	0.58	0.95	0.92	0.81	0.70	0.42	0.74	0.39	0.84	0.91	0.85	8.84

BUPATI BUTON,

KEJABAT PARAF

SERPA

ASISTEN II

KABAG HUKUM

KADIS. PERTANIAN

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016**

Sub Sektor : Perkebunan

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah
		Januari 3	Februari 4	Maret 5	April 6	Mei 7	Juni 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14	
1	Pesarwajo	0.154	0.121	0.200	0.191	0.172	0.145	0.086	0.154	0.081	0.176	0.187	0.174	1.84
2	Wabula	0.077	0.061	0.100	0.096	0.086	0.073	0.043	0.077	0.041	0.088	0.094	0.087	0.92
3	Wolowa	0.084	0.066	0.109	0.104	0.094	0.079	0.047	0.084	0.044	0.096	0.102	0.095	1.00
4	Lasalimu Selatan	0.126	0.099	0.164	0.157	0.140	0.119	0.070	0.126	0.067	0.144	0.153	0.142	1.51
5	Sictapina	0.083	0.050	0.082	0.078	0.070	0.059	0.035	0.063	0.033	0.072	0.077	0.071	0.75
6	Lasalimu	0.076	0.060	0.099	0.095	0.085	0.072	0.043	0.076	0.040	0.067	0.093	0.086	0.91
7	Kapontori	0.119	0.094	0.155	0.148	0.133	0.112	0.066	0.119	0.063	0.136	0.145	0.134	1.42
	Jumlah	0.70	0.55	0.91	0.87	0.78	0.66	0.39	0.70	0.37	0.80	0.85	0.79	8.36

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN XXXVII PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016**

Sub Sektor : *Peternakan*

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah	
		Januari 3	Februari 4	Maret 5	April 6	Mei 7	Juni 8	Juli 9	Agustus 10	September 11	Oktober 12	November 13	Desember 14		
1	Pasarwajo	0.002	0.002	0.005	0.005	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.04
2	Wabula	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.02
3	Wolowa	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.02
4	Lasalimu Selatan	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.03
5	Siotapina	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.03
6	Lasalimu	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.03
7	Kapontieri	0.003	0.003	0.009	0.009	0.009	0.003	0.003	0.003	0.003	0.009	0.009	0.009	0.009	0.07
	<i>Jumlah</i>	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.24

BUPATI BUTON,

PEJABAT PARAF
SEKDA
ASISTEN II
KABAG HUKUM
KADIS - PERTANIAN

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN XXXVII PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 MARET 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2016

Sub Sektor : *Budidaya Perikanan*

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk / Bulan												Jumlah	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	Pasarwajo	0.005	0.003	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.06
2	Wabula	0.005	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.003	0.005	0.006	0.006	0.006	0.06
3	Wclowa	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.04
4	Lasalimu Selatan	0.008	0.006	0.010	0.010	0.009	0.008	0.006	0.008	0.004	0.009	0.010	0.009	0.009	0.09
5	Siotapina	0.006	0.004	0.007	0.007	0.006	0.006	0.004	0.006	0.003	0.006	0.007	0.006	0.006	0.07
6	Lasalimu	0.007	0.009	0.012	0.012	0.010	0.009	0.007	0.009	0.005	0.010	0.012	0.010	0.010	0.11
7	Kapontori	0.035	0.025	0.045	0.045	0.040	0.035	0.025	0.035	0.020	0.040	0.045	0.040	0.43	
	Jumlah	0.07	0.05	0.09	0.09	0.08	0.07	0.05	0.07	0.04	0.08	0.09	0.08	0.9	

RUPATI BUTON,

KABUPATEN PARAF
 SEKDA
 ASISTEN II
 KABAG HUKUM
 KADIS. PERTANIAN

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

15. LAPORAN BULANAN REALISASI KEMAJUAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

FORMAT III.O

LAPORAN BULANAN
REALISASI KEMAJUAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DESA : (Nama Desa)
KECAMATAN : (Nama Kecamatan)
KABUPATEN : Buton
TAHAP :

NO	JENIS PEKERJAAN	RAB Yang Disetujui			Realisasi Fisik				Realisasi (Rp)					Sisa s/d Bulan Ini	%		
		Volume	Satuan	Biaya	Bobot (%)	s/d Bulan Lalu	Bulan ini	Penerimaan		Pengeluaran							
								s/d Bulan ini	Bulan ini	s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan Ini (1+2+13)	Sisa s/d Bulan Ini				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1. dst																
II.	Bidang Pembangunan 1. dst																
III.	Bidang Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat 1. dst																
JUMLAH																	

Mengetahui :
Kepala Desa (Nama Desa)

Bendahara,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

PEJABAT	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
KA-BPM & PEMDES	<i>[Signature]</i>
KA-BPKD	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUKATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

VI.	WOLDWA	564.911.013	656	0,931%	0,233%	146	0,898%	0,31%	7,51	0,75%	0,07%	38,28	1,091%	0,33%	0,95%	49.429.690	614.341.000
70	KAUMBU	564.911.013	1102	1,564%	0,391%	264	1,623%	0,57%	18,49	1,84%	0,18%	26,62	0,758%	0,23%	1,37%	71.401.100	636.312.000
71	WOLDWA	564.911.013	916	1,300%	0,325%	273	1,679%	0,59%	11,13	1,11%	0,11%	49,35	1,406%	0,42%	1,45%	75.284.445	640.195.000
72	MATAWIA	564.911.013	562	0,798%	0,199%	140	0,861%	0,30%	8,79	0,87%	0,09%	46,22	1,317%	0,40%	0,98%	51.222.754	616.134.000
73	WOLDWA BARU	564.911.013	435	0,617%	0,154%	171	1,051%	0,37%	6,01	0,60%	0,06%	58,71	1,673%	0,50%	1,08%	56.472.103	621.383.000
74	SUKA MAU	564.911.013	515	0,731%	0,183%	154	0,947%	0,33%	8,51	0,85%	0,08%	46,36	1,321%	0,40%	1,00%	51.838.826	616.750.000
75	BUNGI	564.911.013	771	1,094%	0,274%	172	1,058%	0,37%	2,90	0,29%	0,03%	35,70	1,017%	0,31%	0,98%	50.933.971	615.845.000
76	GALANTI	564.911.013															
VII.	WABULA																
77	WASJEMBA	564.911.013	592	0,840%	0,210%	125	0,769%	0,27%	5,20	0,52%	0,05%	40,13	1,144%	0,34%	0,87%	45.523.759	610.435.000
78	WABULA	564.911.013	1036	1,470%	0,368%	398	2,447%	0,86%	7,51	0,75%	0,07%	38,65	1,101%	0,33%	1,63%	84.875.548	649.787.000
79	WASAMPELA	564.911.013	724	1,027%	0,257%	235	1,445%	0,51%	5,78	0,57%	0,06%	45,37	1,293%	0,39%	1,21%	62.929.157	627.840.000
80	HOLIMOMBO	564.911.013	584	0,971%	0,243%	227	1,396%	0,49%	11,52	1,15%	0,11%	31,02	0,884%	0,27%	1,11%	57.876.463	622.787.000
81	KOHOLIMOMBANA	564.911.013	464	0,658%	0,165%	194	1,193%	0,42%	10,40	1,03%	0,10%	27,94	0,796%	0,24%	0,92%	48.159.141	613.070.000
82	WABULA SATU	564.911.013	1187	1,685%	0,421%	456	2,804%	0,98%	8,67	0,86%	0,09%	30,46	0,868%	0,26%	1,75%	91.121.990	656.033.000
83	BAJO BAHARI	564.911.013	432	0,613%	0,153%	143	0,879%	0,31%	0,04	0,00%	0,00%	60,77	1,732%	0,52%	0,98%	51.101.746	616.013.000
	Total	46.887.614.100	70.466	100%	25%	16.263	100%	35%	1.006	100%	10%	3.510	100%	30%	100%	5.209.734.900	52.097.349.000

Kontrol Panghitungan	
Pagu Dena Desa Kabupaten Buton	52.097.349.000 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	46.887.614.100 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	5.209.734.900 (e)
Jumlah Desa	83 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
L.W	10% (i)
IKG	30% (j)

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PAJU
SEKDA	h
ASISTEN I	i
KA - BPKD	h
KA - BPMPD	h
KABAG HUKUM	h